



RUSLI MOIDADY, ST.,MT
Bupati

SERFI KAMBEY
Wakil Bupati



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN 2025

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) memuat capaian makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, dan inovasi Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah selama I (satu) tahun sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas melalui media cetak maupun elektronik.

Salakan, 31 Maret 2026

Bupati Banggai Kepulauan



RUSLI MOIDADY



1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional khususnya Kabupaten Banggai Kepulauan.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	Tahun 2024	Tahun 2025	Ket
1	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,65	68,44	
2	Laju Penurunan Angka Kemiskinan	12,32	11,49	
3	Laju Penurunan Angka Pengangguran	1.55	1.67	
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.03	4.23	
5	Laju Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita	43.17	46,83	
6	Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan	0,276		Belum rilis 2025

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar adalah capaian kinerja pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan (Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial).

Urusan Pendidikan

A. CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh dinas Pendidikan dengan 6 (Enam) Indikator Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut:



NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Presentase Anak Usia 5 s.d 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini	70,79%	72,43 %
2	Presentase Anak Usia 7 s.d 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,33%	88,55 %
3	Presentase Anak Usia 13 s.d 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,29 %	88,55%
4	Presentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasidalam PendidikanKesetaraan	0 %	100%
5	Presentase Toilet Sekolah Dasar, sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Indikator baru	23,18%
6	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Indikator baru	28,81%



B. REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 sebesar Rp.14.845.177.902 dengan program kegiatan sebagai berikut :

A. Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD pada :

1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru
3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
4. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

B. Program SPM Pendidikan Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
7. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

9. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
10. Pembangunan Ruang Kelas Baru
11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
12. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
13. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
14. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik



15. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

C. Program SPM Pendidikan Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan

1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

C.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Masalah yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain adalah belum maksimalnya Pengumpulan data, kurangnya informasi terkait SPM di tingkat satuan pendidikan, perencanaan anggaran yang belum optimal, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah serta belum sempurnanya Alokasi Anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah adanya peran Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Dasar khususnya urusan pelayanan dasar agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

Urusan kesehatan

A.CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh dinas Kesehatan dengan 14 (Empat belas) Indikator Pelayanan Dasar dan capaian kinerja sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase kematian ibu	Indikator baru	0,13%
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Indikator baru	14,14 %



3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	80,09 %	69,80 %
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	95,02 %	86,25 %
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	67,02 %	66,71 %
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	70,41 %	82,26 %
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	9,57 %	84,00%
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai standar	50,18 %	42,67 %
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31,06 %	34,29 %
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	63,69 %	75,32%
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai	75,75 %	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	92,34 %	93,42%
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai standar	74,72 %	1,90%
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	61,05%	62,38%



	Immunodeficiency Virus) sesuai standar		
--	--	--	--

B.REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja Urusan kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 sebesar Rp.512.094.042 dengan program kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam upaya pelaksanaan program dan kegiatan secara baik,berhasil dan maksimal dipersiapkan solusi-solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu

- Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
- Adanya program Indonesia sehat melalui pendekatan pendekatan Keluarga(PIS-PK)
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(GERMAS)
- Adanya Kebijakan Pengalokasian Anggaran bidang Kesehatan Minimal 10% dari Total APBD sesuai amanat undang-undang 36 tahun 2009
- Tersedianya sarana dan prsarana kesehatan walaupun belum memenuhi standar
- Tersedianya sumberdaya manusia kesehatan walaupun belum memenuhi standar



- Adanya desentralisasi bidang Kesehatan
- Adanya Dukungan Masyarakat dalam implementasi program Kesehatan
- Penambahan Sumberdaya Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan spesifikasi Pendidikan
- Pendidikan dan Pelatihan teknis tenaga Kesehatan

Efisiensi Penggunaan Dana

Urusan Pekerjaan Umum

A.CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan umum dengan 10 (Sepuluh) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	23,10%	0,00%
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	35,23%	33,77%
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	69%	24,14%
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air	94,75 %	75,12%



	limbah domestic		
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	82,39 %	39,89%
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	82,39 %	82,45 %
7	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100 %	100%
8	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0 %	71,13%
9	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Indikator baru	100%

B. REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 sebesar Rp.16.919.176.270 dengan program kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

B. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah



Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pekerjaan Umum :

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan SPM Bidang Air minum yaitu rentang waktu pendistribusian pengadaan barang yang membutuhkan waktu yang cukup lama di karenakan di mobilisasikan menggunakan kapal kontainerr dari luar pulau dan cuaca sangat mempengaruhi waktu tiba barang tersebut,sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekejaan dilapangan.

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan SPM Bidang air limbah sama seperti kendla bidang air minum yaitu keterlambatan pendistribusian pengadaan.

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Urusan Perumahan dilasanakan oleh dinas Perumahan dengan 4 (Empat) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
----	-------------------------	---------------------------	-------------------------



1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	83,33%
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	1,02 %	0,00%
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	40,20 %	0,001%
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0 %	0,00%

B. REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja Urusan Perumahan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 sebesar Rp.410.168.000 dengan program kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Perumahan :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
 - Pembangunan rumahbagikorban bencana

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

a. Permasalahan

- Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para Pemangku Kebijakan (Stakeholder) sebagai bentuk mewujudkan pelaksanaan prioritas program pemerintah baik itu urusan wajib maupun urusan penunjang lainnya. Serta minimnya anggaran yang teralokasikan juga sebagai faktor utama pelaksanaan kegiatan



- Tidak mempunyai Baseline Data (informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai) penanganan rumah layak huni bagi korban Bencana sehingga belum bisa merencanakan target yang akan ditangani di tahun 2025
- Belum adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merelokasi rumah terdampak pembangunan Daerah sehingga baik perencanaan maupun realiasi belum ada

b. Solusi

Solusi dalam mengatasi masalah perumahan rakyat adalah menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada SPM pada Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta mengakomodir anggarannya, khususnya pada Bidang Perumahan agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat terwujud.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Pol PP dengan 3 (Tiga) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	100%	100%
2	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	62,%	87,50%
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	40,00%

B. REALISASI BELANJA



Realisasi Belanja Trantibum Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 sebesar Rp.1.250.411.050 dengan program kegiatan sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM TRANTIBUM :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
 - Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (DAMKAR)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM TRANTIBUM

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten
 - Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Masalah yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain :

1. Minimnya jumlah anggota yang memiliki SDM sehingga berdampak kurng maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional dan penertiban
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten banggai Kepulauan
3. Kurangnya Koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu penegakan perd dengan instansi terkait
4. Kurangnya pengalokasian anggaran unuk penerapan peningkatan standr pelayanan Minimal terutama pada sub kegiatan penunjang
5. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perda dan saksi pelanggaran terhadap Perda pengaturan Perda/Perkada



6. Kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsi, indikator kinerja dan fungsi perencanaan yang efektif dan efisien
7. Kurangnya komitmen dan koordinasi dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagai jadwal (action plan)

Solusi

1. Senantiasa melakukan penataan pembinaan anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta perlu dilakukan pendidikan bagi seluruh Aparatur Satuan polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran dalam setiap proses pelaksanaan tugas dan fungsi dilapangan
2. Secara bertahap Satuan Polisi Pamong Praja memenuhi kebutuhan sarana dan Prasarana yang diperlukan, dan telah dituangkan dalam rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait mengenai tugas masing-masing perangkat daerah dalam proses penegakan Perda dan Perkada serta pemeliharaan trantibum di Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan serta komitmen bersama antara pemerintah daerah dan perangkat daerah pengampuh SPM sehingga penerapan mutu pelayanan berbasis target, bisa terakomodir selama tahun berjalan
5. Melakukan sosialisasi Perda/ Perkada melalui media sosial, mengumpulkan, mendatangi bertatap muka langsung dengan masyarakat
6. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kebakaran, serta penyebaran kontak person di masyarakat agar penanganan kebakaran cepat terdeteksi dan tertangani
7. Perlunya diberikan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman pejabat struktural mengenai tugas pokok dan fungsi, indikator kinerjanya masing – masing serta perencanaan keuangan dan kegiatan

Sub urusan Bencana (Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)

A. CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Urusan Bencana dengan 3 (Tiga) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:



NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Indikator baru	66%
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,84 %	1,15 %
3	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %

B.REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja urusan bencana Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 sebesar Rp.27.847.515.329 dengan program kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Bencana :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 -
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
3. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana
 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

C.PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Masalah yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain :

1. Kurangnya koordinasi yang baik di internal OPD itu sendiri



2. Kurangnya pengawasan, Monitoring dan evaluasi yang baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan penerapan SPM .
3. Kurangnya Tata Kelola pemamfaatan anggaran yang baik dengan tidak melihat program kegiatan yang bersifat prioritas serta kegiatan yang masuk dalam pemenuhan SPM yang kadang terabaikan
4. Kurangnya kemampuan, ketersediaan sumber daya manusia dan pemahaman ASN dalam penerapan SPM
5. Kurang tersedianya anggaran dalam mendukung kegiatan Penerapan SPM
6. Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Dinas BPBD untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.
7. Masih banyak pelatihan teknis penanggulangan dan pencegahan bencana yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan aparatur BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan maupun relawan

Solusi

1. Meningkatkan koordinasi yang baik di internal OPD itu sendiri maupun lintas OPD
2. Meningkatkan pengawasan, Monitoring dan evaluasi yang baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan penerapan SPM
3. Meningkatkan Tata Kelola pemamfaatan anggaran yang baik dengan tidak melihat program kegiatan yang bersifat prioritas serta kegiatan yang masuk dalam pemenuhan SPM yang kadang terabaikan
4. Meningkatkan kemampuan, ketersediaan sumber day manusia dan pemahaman ASN dalam penerapan SPM
5. Meningkatkan ketersediaan Anggaran dalam mendukung kegiatan penerapan SPM bidang Kebencanaan

Urusan Sosial

A. CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan 6(Enam) Indikator Pelayanan Dasar capaian kinerja sebagai berikut:



NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Indikator baru	5,76%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Indikator baru	12,56%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Indikator baru	34,84%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Indikator baru	0
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	100%
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Indikator baru	44,06%

B.REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja urusan Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2025 sebesar Rp.225.500.000 dengan program kegiatan sebagai berikut :

A. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM SOSIAL :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial



- Penyediaan permakanaan
 - Penyediaan sandang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyediaan makanan
3. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Pmks Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

a. Permasalahan dan solusi

- Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Permasalahannya adalah mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termuat dalam Peraturan Lama tidak muncul di Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, padahal Jenis Pelayanan Dasar tersebut sangat penting dalam mendukung program pemerintah pada penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya permasalahan di atas, solusi agar diketahui oleh Pemerintah Daerah berikut kami sebutkan perhitungan presentase, alokasi anggaran dan dukungan personil mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya untuk Kepala Keluarga (KK) Miskin.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN

Hasil EPPD Atas LPPD Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan

- a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan status penilaian rendah.



- b. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan status penilaian rendah.
- c. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dengan status penilaian sedang.

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024 Kabupaten Banggai Kepulauan Mendapatkan Penilaian WDP
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2025 Kabupaten Banggai Kepulauan dalam proses pemeriksaan.

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah

Adapun unaudit Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Pendapatan Daerah	866.153.528.195,07	820.897.589.294,48	94,78
	- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	71.595.780.454,07	58.535.303.815,69.	81,76
	Pajak Daerah	13.770.353.698,25	11.173.606.930,00	81,14
	Retribusi Daerah	3.112.870.914,60	1.578.418.391,33	50,70
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.231.000.000,00	6.215.764.918,00	99,76
	Lain-lain PAD yang Sah	48.481.555.841,22	39.567.513.576,36	81,61
	- Pendapatan Transfer	794.457.747.741,00	762.262.285.478,79	95,95
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	748.159.091.000,00	733.490.583.152,00	98,04
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.298.656.741,00	28.771.702.326,79	62,14
	- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Pendapatan Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
2	Belanja Daerah	913.134.571.311,72	857.724.190.255,93	93,93
	- Belanja Operasi	645.058.154.530,78	614.833.428.745,93	95,31
	Belanja Pegawai	430.664.089.688,18	419.610.585.085,00	97,43
	Belanja Barang dan Jasa	200.424.534.744,60	181.947.845.791,43	90,78
	Belanja Hibah	9.484.315.578,00	9.252.946.869,00	97,56
	Belanja Bantuan Sosial	4.485.214.520,00	4.022.051.000,00	89,67
	- Belanja Modal	104.355.994.372,00	97.941.994.104,00	93,85
Belanja Modal tanah	1.174.246.151,00	959.899.850,00	81,74	



	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.227.757.816,00	10.643.168.077,00	87,04
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.535.167.638,00	27.423.617.765,00	96,10
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	60.341.356.867,00	56.974.011.694,00	94,41
	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	2.077.465.900,00	1.941.296.718,00	93,44
-	Belanja Tidak Terduga	522.973.368,94	238.458.000,00	45,59
-	Belanja Tidak Terduga	522.973.368,94	238.458.000,00	45,59
-	Belanja Transfer	163.197.449.040,00	144.710.309.406,00	88,67
-	Belanja Bagi Hasil	1.547.727.040,00	807.527.200,00	52,17
-	Belanja Bantuan Keuangan	161.649.722.000,00	143.902.782.206	89,02
	Surplus/Defisit	(46.981.043.116,65)	(36.826.600.961,45)	78,38
3	Pembiayaan	46.981.043.116,65	46.981.043.116,65	100,00
-	Penerimaan Pembiayaan	50.341.043.116,65	50.341.043.116,65	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.341.043.116,65	50.341.043.116,65	100,00
-	Pengeluaran Pembiayaan	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	3.360.000.000,00	3.360.000.000,00	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	10.154.442.155,20	0,00

5. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Maupun Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2025 sebagai berikut ini:

NO	PELAKSANAAN INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	LACI PUL LKPM	Langkah Cepat Informasi Pelaku Usaha Layani
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	P2IP Google Earth	Peta Potensi Investasi Pariwisata
3	Dinas Penanaman Modal dan	JAPRI	Jemput Antar Berkas Perizinan



	Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		khusus kelompok marginal/rentan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	SISKAMLING	SISTEM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PULAU PELING
5	Dinas Pertanian	PADI GOGO GREEN	PADI GOGO GREEN
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	(POSiiDA) Kab. Banggai Kepulauan	Portal Informasi Riset dan Inovasi Daerah (POSiiDA) Kab. Banggai Kepulauan
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	(GEMBIRA)	Gerakan Edukatif Membangun Banggai Kepulauan Berbasis Inovasi dan Replikasi (GEMBIRA)
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	(KLIK BANG)	Klinik Inovasi Bappeda dan Litbang
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	(SI PEMBATIK)	Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Tematik
10	Satuan Polisi Pamong Praja	LACAK BENTOR	LACAK BENTOR, Layanan Cepat Aduan Informasi Kebakaran dan



			Tibumtranmas Berbasis Komunitas (Becak Motor)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	DIGITILISASI BALAPOR BERKAH BERSEHATI	DIGITILISASI BALAPOR BERKAH BERSEHATI
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Banggai Kepulauan (Bangkep) Berkah Mengaji	Banggai Kepulauan (Bangkep) Berkah Mengaji
13	Dinas Sosial	SURU REKAPIN	(SURAT PENGURUSAN REKOMENDASI KARTU INDONESIA PINTAR
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(SMART PERKIMTAN)	Sistem Informasi Perumahan Kawasan Permukiman
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Pengembangan Jalan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sistem Informasi Pengembangan Jalan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
16	Dinas Kesehatan	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) SEMESTA	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) SEMESTA
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DARSIP	DARSIP
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ZIGRA	ZIGRA



9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	GERAKAN “MONDOPULIAN”	(Menyediakan Sekolah Aman Dari Rokok, Presekusi, Perundungan, Kekerasan Seksual, Intoleransi dan Narkoba) DALAM Mendukung PENYIAPAN PROFIL PELAJAR PANCASILA
10	Dinas Lingkungan Hidup	DIGITALISASI PENGARSIPAN DOKUMEN PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN MENGGUNAKAN APPSHEET PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGGAI KEPULAUAN	DIGITALISASI PENGARSIPAN DOKUMEN PELAYANAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN MENGGUNAKAN APPSHEET PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BANGGAI KEPULAUAN